

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi muda pada zaman ini untuk menuju arah yang lebih baik lagi agar menjadikan generasi penerus bangsa memiliki kemampuan dalam membangun bangsanya. Dengan menjadi suatu upaya yang utama, pendidikan haruslah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pendidikan yang dijalankan dengan memikirkan kualitas merupakan suatu hal yang menjadi keharusan. Perkembangan pendidikan pada saat ini semakin mengalami peningkatan, oleh sebab itu pada perkembangannya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat bersaing baik di dalam negeri maupun dunia terutama pada negara-negara maju maka sangatlah penting untuk tidak ketinggalan tentang perkembangan teknologi informasi dan selalu mengikutinya karena hal tersebut yang dapat menolong dalam memberikan berbagai informasi yang memiliki kaitan dengan pengetahuan dalam bidang akademik.

Pendidikan memiliki prinsip untuk semua yang artinya haruslah dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat (*education for all*) dengan tidak harus memikirkan perbedaan asal usulnya, ekonomi dan status sosial serta kewilayahannya. Dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang mengamanatkan jika setiap warga negara memiliki hak memperoleh pendidikan dan negara wajib membiayainya. Oleh sebab demikian, pemerintah akan selalu berusaha dalam memenuhi amanat untuk membangun sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan menyiapkan tenaga pendidik yang berkompeten.

Dalam pendidikan, seperti yang terdapat pada kebijakan pemerintah pada bidang pendidikan serta tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu dikatakan bahwa dalam menghadapi tantangan yang sesuai tuntutan zamannya dimana saat ini terjadi perubahan baik dari segi kehidupan lokal, nasional, maupun global maka dari itu diperlukan adanya pembaharuan dalam dunia pendidikan dengan terencana, terarah, dan berkesinambungan satu sama lain.

Namun dalam kenyataannya, pendidikan yang bangsa Indonesia dihadapi saat ini memunculkan berbagai permasalahan salah satunya yaitu mutu pendidikan yang rendah pada satuan pendidikan maupun tiap-tiap jenjang pendidikan, terkhusus untuk pendidikan dasar serta pendidikan menengah. Berbagai usaha sudah dilaksanakan terhadap pendidikan nasional dalam meningkatkan mutu, diantaranya lewat bermacam peningkatan kompetensi serta pelatihan terhadap tenaga pendidik, perbaikan pendidikan dalam bidang sarana maupun prasarana dan meningkatkan manajemen mutu sekolah itu sendiri. Prestasi atau hasil yang maksimal menjadi tolok ukur keberhasilan yang mungkin hanya dapat diraih ketika ditunjang oleh kedisiplinan dengan tingkat yang tinggi pada setiap komitmen dan program yang tinggi dan pada konsep pengelolaan yang stakeholders sepakati.

Standar mutu Pendidikan telah diatur dan dikendalikan oleh pemerintah dengan kebijaksanaan dalam peningkatan kualitas serta efisiensi manajemen pendidikan, seperti yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional, pada pasal 2 dikatakan bahwa Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Menyikapi hal tersebut pada hal ini pemerintah akan selalu memiliki upaya dalam mempersiapkan satuan pendidikan yang tersedia dan layak termasuk didalamnya dalam meningkatkan kualitas kompetensi guru lewat berbagai program antara lain program peningkatan wawasan ilmu yang berbentuk *workshop*, diklat, seminar dan lainnya.

Berdasarkan informasi yang terdapat pada media Indonesia.com yang dipublikasikan pada Kamis, 16 Desember 2021 yang berjudul “Kinerja 18 Ribu Sekolah dan Madrasah Turun di Tahun 2021” dinyatakan bahwa laporan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terdapat 18.406 sekolah/madrasah sepanjang tahun 2021 mengalami penurunan kinerja. Hal itu terlihat dari *dashboard monitoring system* yang dikembangkan, hanya ada sekitar 77,4% atau 63.094 sekolah/madrasah yang tetap atau mengalami peningkatan dalam hal kinerja sedangkan sisanya 22,6% atau sekitar 18.406 kinerja sekolah/madrasah mengalami penurunan. Secara prosedural dalam menentukan status akreditasi, sekolah yang mengalami penurunan kinerja haruslah dilakukan visitasi. Sedangkan 5.668 sekolah akan menjadi sasaran baru termasuk sekolah-sekolah yang belum memiliki predikat akreditasi.

Sebagaimana telah disampaikan Presiden dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 16 Agustus 2018, Presiden mengatakan betapa penting pembangunan sumber daya manusia untuk investasi jangka panjang terhadap pembangunan bangsa. Dalam kesempatan tersebut ia juga mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah modal yang paling besar dan paling kuat yang harus Indonesia miliki. Dilihat dari hal ini, pembangunan sumber daya manusia nantinya sebagai prioritas utama dengan cara membangun SDM

yang dinamis, pekerja keras, terampil, serta menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam pidatonya (Bapak Nadiem Makarim; 2021) pada peringatan Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2021, menegaskan bahwa pemerintah sedang mengupayakan perbaikan dalam tatanan pendidikan bersama berbagai elemen masyarakat. Adapun perbaikan yang dimaksud Bapak Nadiem adalah perbaikan terhadap infrastruktur maupun teknologi, prosedur, kebijakan dan pendanaan dan memberikan satuan pendidikan otonomi yang lebih, perbaikan kepemimpinan, budaya dan masyarakat serta perbaikan kurikulum, asesmen dan pedagogi.

Implementasi kebijakan pemerintah merupakan hal yang sangat mendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Fakta sejarah telah membuktikan dengan adanya perubahan fundamental dalam sisdiknas selepas reformasi tahun 1998. Kebijakan otonomi secara nasional berimbas juga kepada otonomi bidang pendidikan. Keluarnya UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta PP 38 tahun 2007 menyebabkan kewenangan yang berkaitan dengan pendidikan terdapat pada kendali pemerintah daerah.

Peluang bagi daerah cukup besar terbuka bagi pendidikan menjadi lebih berkualitas karena otonomi pendidikan. Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan diatur pada UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada Pasal 4 ayat 6 yaitu pendidikan dapat diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat di dalamnya dan ikut serta sebagai penyelenggara dan pengendali mutu layanan dalam pendidikan itu sendiri.

Pemerintah yang memegang kebijakan dalam tatanan hidup bernegara mesti bisa menelaah dinamika kehidupan sosial yang berubah-ubah serta budaya yang ada pada masyarakat, diantaranya adalah pada bidang pendidikan. Kebijakan pemerintah diharapkan dapat mendorong perubahan menuju kepada hal yang lebih positif mengharapkan sekolah sebagai lembaga pendidikan mampu meningkatkan mutu pendidikan di antaranya dengan penggunaan teknologi informasi dengan sistem informasi yang lebih tertata dan tersimpan dengan baik serta penerapan kebijakan yang otonomi di sekolah tersebut.

Adanya sebuah manajemen sekolah yang terbentuk di dalam satuan pendidikan adalah suatu unsur integral serta tidak bisa terpisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Dengan tidak adanya manajemen maka tujuan pendidikan dimungkinkan tidak bisa terwujud dengan efisien, efektif dan optimal. Dilihat dari konsep itu dapat berlaku pada sekolah yang membutuhkan manajemen yang efisien dan efektif. Pada kerangka tersebut kesadaran tentang seberapa penting manajemen berbasis sekolah (MBS) akan tumbuh dan hal itu memberi kewenangan secara penuh terhadap sekolah dan guru untuk mengatur/mengelola pengajaran dan pendidikan, mengorganisasi, merencanakan, mempertanggung jawabkan, mengawasi serta memimpin sumber daya manusia dan barang-barang yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran yang semuanya ini akan berdampak pada kualitas mutu sebuah sekolah.

Manajemen yang memiliki basis sekolah ini adalah salah satu program nasional seperti yang terdapat pada UU No. 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional pasal 50 (1) yaitu : manajemen satuan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah dilakukan atas dasar standar pelayanan minimal menggunakan prinsip pengelolaan yang memiliki basis madrasah/sekolah.

Pengelolaan pendidikan tanggung jawabnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi pihak masyarakat dan sekolah juga termasuk untuk tujuan pendekatan dalam mengambil keputusan pada tingkat *grassroots* (yang terdekat pada peserta didik).

Pada umumnya penerapan manajemen berbasis sekolah telah bisa sebagian sekolah terapkan dengan baik terutama pada sekolah-sekolah yang terdapat di kota yang telah mempunyai SDM yang mencukupi baik dilihat dari kompetensi ataupun kualifikasi. Tapi disisi lainnya, masih terdapat banyak sekolah terkhusus para kepala sekolah yang mengelola sekolah belum secara baik bagaimana berkomunikasi dan berkoordinasi terhadap setiap warga sekolah serta masyarakat. Hal tersebut terlihat dari masyarakat dan warga sekolah yang terindikasi tidak mengetahui program sekolah dan penggunaan dana sekolah yang sumbernya berasal dari dan BOS ataupun dari suatu pihak (masyarakat) dikarenakan dalam penggunaannya tidak disosialisasikan secara akuntabel dan terbuka yang menyebabkan sering timbulnya kecurigaan di antara warga sekolah yang dapat berdampak guru, masyarakat serta warga sekolah lainnya kurang antusias dalam mendukung program sekolah. (kompasiana.com, publikasi 24 Juni 2015).

Kholis (2003:132) menjelaskan terdapat Sembilan strategi yang dapat dipakai supaya strategi implementasi kebijakan manajemen berbasis sekolah bisa dijalankan dan sukses. Sebagai berikut: 1) Sekolah mesti mempunyai otonomi pada empat sesuatu, yaitu: kewenangan dan kekuasaan, pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang berkesinambungan, akses terhadap informasi pada semua hal dan penghargaan kepada pihak yang berhasil; 2) Terdapat masyarakat yang berperan serta dengan aktif pada pembiayaan, proses

pengambilan kurikulum dan instruksional non-instruksional; menurutnya ada sembilan strategi yang bisa digunakan agar strategi implementasi kebijakan manajemen berbasis sekolah dapat berjalan dengan sukses. Sebagai berikut: 1) Sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal, yaitu: kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian, serta penghargaan kepada pihak yang berhasil; 2) Adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam pembiayaan, proses pengambilan kurikulum dan instruksional non-instruksional; 3) Terdapat kepemimpinan sekolah yang kuat; 4) Demokratis dalam proses mengambil keputusan; 5) setiap pihak paham akan tanggung jawab serta perannya dengan sungguh-sungguh; 6) Terdapat *guidelines* (garis pedoman) yang berasal dari Departemen Pendidikan; 7) Sekolah mempunyai akuntabilitas dan transparansi yang setidaknya diciptakan pada pertanggung jawaban setiap tahun; 8) MBS di dalam penerapannya mesti diarahkan supaya dapat mencapai kinerja kerja; 9) Dalam mengawali implementasi harus dilakukan dengan konsep MBS, identifikasi masing-masing peran pembangunan kelembagaan, pelatihan dan lainnya.

Dilihat dari hasil wawancara terhadap Kepala Sekolah serta sebagian dewan guru pada SD Negeri Kecamatan Sematang Borang Palembang yang dilakukan sebelum melakukan penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa kondisi di lapangan tentang mutu pendidikan SD Negeri di Kecamatan Sematang Borang Palembang memperlihatkan jika masih terdapat Sebagian sekolah yang belum dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penunjang baik dalam pendataan siswa maupun penilaian secara *online*, pembuatan media belajar *online*, serta pemanfaatan berbagai aplikasi *online* sebagai sarana belajar

secara efisien. Faktor ini dipengaruhi oleh adanya kecenderungan menurun dalam hal melek media diantaranya adalah guru gagap teknologi (gaptek), masih dominan menggunakan pola mengajar yang tradisional, serta pola pendataan siswa secara manual serta sarana prasarana yang kurang mendukung seperti pemanfaatan *hot-spot area* yang belum efektif ke semua guru dan tenaga kependidikan. Apabila hal tersebut tidak ditangani dan terus berlanjut tanpa terdapat perubahan maka bisa mempengaruhi kualitas dari mutu sekolah tersebut, hal ini haruslah sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan sekolah untuk memperbaiki kualitas output dan input sekolah masing-masing dengan berpedoman pada kebijakan otonomi sekolah di Kecamatan Sematang Borang Palembang.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji faktor penunjang dalam mutu pendidikan dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis data sebagai acuan dalam pelayanan kepada masyarakat umum sedangkan pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang proses pembelajaran mengingat saat ini dunia semakin mengalami kecanggihan yang luar biasa. Tentunya dalam hal ini sekolah tidak bisa tinggal diam, dan haruslah memiliki kebijakan-kebijakan dalam mengatur sekolahnya agar terus dan terus mengalami kemajuan. Sekolah juga harus siap menghadapi tantangan perubahan zaman, kualitas dan kuantitas pendidik serta tenaga pendidik perlu ditingkatkan dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan di setiap masing-masing sekolah.

Dalam kaitannya dengan hasil observasi atau pengamatan peneliti terhadap kondisi SD Negeri di Kecamatan Sematang Borang Palembang, bahwasannya mengalami persoalan yang berkaitan dengan tata kelola atau

manajemen sekolah. Sebelumnya pernah dilakukan penelitian pada SD Negeri 245 di Kecamatan Sematang Borang yang dilaksanakan oleh Ernawati (2021), dengan judul “Manajemen Berbasis Sekolah ditinjau dari Kualitas Tenaga Pendidik untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan”. Dilihat dari hasil penelitian memperlihatkan jika manajemen berbasis sekolah atau tata kelola semua sumber daya sekolah yang dilaksanakan bersama oleh komunitas sekolah belum berjalan dengan optimal. Masih adanya sebagian kendala yang menghambat tekad manajemen sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan. Kendala tersebut diantaranya berupa keterbatasan sarana prasarana sekolah sesuai dengan tuntutan kurikulum, kondisi kualitas tenaga pendidik yang belum menampilkan kinerja mengajar secara inovatif sesuai tuntutan zaman yang mana pada konteksnya perkembangan teknologi informasi secara langsung menuntut para guru mampu beradaptasi dengan canggihnya kemajuan itu.

Selaras seperti penelitian yang dilaksanakan oleh Tarom (2019) dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Manajemen Sekolah terhadap Kinerja Pembelajaran Guru Sekolah Dasar dalam Meningkatkan Mutu dan Hasil Belajar di Sumedang” menyebutkan bahwa hasil analisis data yang menunjukkan adanya implementasi kebijakan manajemen sekolah berpengaruh pada kinerja guru dalam meningkatkan mutu serta hasil belajar siswa pada sekolah. Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian sekarang, yaitu meneliti apakah terdapat pengaruh manajemen berbasis sekolah pada mutu pendidikan di sekolah yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizkayanti (2019) menyebutkan bahwa hasil analisis data yang menghasilkan F Hitung dengan nilai 34,012 serta F Tabel dengan nilai 3,99 maka $F \text{ Hitung} > F \text{ Tabel}$ ($34,012 > 3,99$) yang berarti H_0 ditolak.

Yang artinya terdapat pengaruh dari penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas pelayanan administrasi di SMA Negeri 5 Barru. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian sekarang, yaitu meneliti pengaruh teknologi informasi. Selanjutnya perbedaan pada penelitian sekarang yaitu meneliti pengaruh teknologi informasi dan manajemen berbasis sekolah terhadap mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Sematang Borang Palembang.

Bertitik tolak pada beberapa penelitian di atas, jadi jelas bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi serta penerapan manajemen berbasis sekolah adalah sebuah proses yang dapat berjalan seiring juga pada proses peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Tak dapat dipungkiri, teknologi memegang peranan tidak kalah penting pada tujuan untuk mewujudkan lulusan yang berkualitas dan profesional. Akan tetapi, masih banyak para guru yang belum melek media atau gagap teknologi serta belum memenuhi kriteria tuntutan sebagai persentase penguasaan teknologi. Kondisi seperti ini merupakan gambaran akan rendahnya kualitas mutu sekolah, yang mengakibatkan minat yang kurang pada orang tua dalam memasukkan anak pada sekolah tersebut.

Pada Kecamatan Sematang Borang Palembang terdapat 4 (empat) Sekolah Dasar Negeri diantaranya SD Negeri 245, 246, 247 dan 248. Hasil tinjauan awal peneliti dilihat dari akreditasi pada masing-masing sekolah hanya SD Negeri 245 yang berpredikat A sedangkan yang lainnya menyandang predikat B. Hal ini terkait dengan sarana prasarana sekolah yang masih belum memadai dalam menunjang pembelajaran sekolah. Akibatnya berdampak pada pemberian mutu dalam melayani terhadap masyarakat dalam hal tersebut ialah peserta didik.

Disamping itu juga, dalam mengukur kualitas guru berdasarkan sertifikat pendidik, ternyata masih terdapat beberapa guru pada SD Negeri Kecamatan Sematang Borang yang belum memiliki sertifikat pendidik. Hal inilah yang dijadikan salah satu tolok ukur apakah seorang guru bisa dikatakan berkualitas. Beberapa kendala lainnya yang didapat peneliti dari narasumber beberapa guru SD Negeri di Sematang Borang mengatakan bahwa kurangnya minat guru dalam mengembangkan kompetensinya seperti mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop, seminar dan lainnya disebabkan berbagai faktor diantaranya disebabkan oleh kendala waktu, kesibukan serta minimnya pengetahuan dibidang teknologi yang mana pada akhir-akhir ini pendidikan di dominasi oleh pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan (daring).

Didasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut apakah penerapan teknologi informasi dan manajemen pendidikan memberikan pengaruh terhadap mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sematang Borang Palembang melalui penelitian yang berjudul “Pengaruh Teknologi Informasi dan Manajemen Berbasis Sekolah terhadap Mutu Pendidikan di SD Negeri se-Kecamatan Sematang Borang Palembang”.

B. Identifikasi Masalah

Didasari latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas maka bisa diidentifikasi masalah antara lain yaitu:

1. Mutu pendidikan di SD Negeri se-Kecamatan Sematang Borang Palembang sudah cukup baik, namun masih perlu adanya peningkatan lagi terutama dalam bidang teknologi. Yang menjadi faktor penyebab

rendahnya kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tersebut salah satunya adalah kemajuan teknologi. Data diperoleh berdasarkan observasi peneliti, salah satunya dilihat dari akreditasi sekolah yang rata-rata berpredikat B.

2. Manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Kecamatan Sematang Borang dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Hal ini terlihat dari kompetensi guru dalam menjalankan profesi sebagai tenaga pendidik, komunikasi personal antara *stakeholders* yang dapat mempengaruhi dalam mewujudkan manajemen sekolah yang baik. Data diperoleh dari menggali informasi langsung terhadap Kepala Sekolah serta dewan guru.
3. Sarana dan prasarana sekolah pada SD Negeri di Kecamatan Sematang Borang cukup dimanfaatkan dengan baik namun masih minim sehingga belum secara optimal dapat menunjang ketercapaian keberhasilan peningkatan mutu pembelajaran dalam mencetak lulusan yang baik. Data diperoleh dari hasil rapor mutu sekolah di SD Negeri Sematang Borang terkait dengan penilaian akreditasi sekolah yang masih terkendala pada standar sarana prasarana.
4. Berbagai cara untuk meningkatkan kompetensi guru di SD Negeri Kecamatan Sematang Borang terus dilakukan oleh sekolah, namun masih perlu peningkatan. Terutama dalam membangkitkan semangat dan minat guru untuk pengembangan kompetensi, seperti mengikuti pelatihan, seminar, *workshop* dan lainnya. Data berdasarkan hasil wawancara guru.
5. Terdapat beberapa guru khususnya PNS di lingkungan Sematang Borang berdasarkan rapor mutu sekolah, sekitar 25% dari jumlah keseluruhan belum memenuhi lulus uji kompetensi guru untuk mendapatkan sertifikat

pendidik yaitu suatu syarat untuk pengelolaan mutu pendidikan pada sekolah.

6. Sistem mengajar guru-guru sudah memanfaatkan teknologi, namun ada juga guru yang belum secara optimal menggunakan teknologi informasi dengan kreatif dan inovatif. Hal ini didominasi karena keterbatasan kompetensi guru dalam penguasaan IT. Data didapat dari hasil wawancara terhadap dewan guru.
7. Dalam penerapan visi misi sekolah di SD Negeri Kecamatan Sematang Borang sudah sesuai dengan target sekolah, namun disisi lain masih terdapat kendala sekolah dalam mewujudkan ketercapaiannya dengan mengelola komponen manajemen seperti manajemen humas, manajemen keuangan, serta manajemen kurikulum. Berdasarkan hasil wawancara terhadap empat Kepala Sekolah Negeri di Kecamatan Sematang Borang.

C. Pembatasan Masalah

Didasari dari latar belakang dan identifikasi masalah, supaya pembiasaan permasalahan tidak terjadi, maka ruang lingkup masalah dibatasi oleh penulis pada penelitian ini. Batasan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Teknologi informasi, dilihat dari indikatornya yang menjelaskan tentang pengguna/penerima, kemudahan dan manfaat.
2. Manajemen berbasis sekolah, ditinjau dari lima prinsip dalam pelaksanaan MBS yaitu (1) kemitraan, (2) kemandirian, (3) keterbukaan, (4) partisipasi, (5) akuntabilitas.
3. Mutu Pendidikan, dilihat dari sub variabel yang dipakai yakni (1) daya tanggap, (2) kehandalan, (3) keyakinan/jaminan, (4) empati.

4. Cakupan penelitian ini terbatas di SD Negeri yang terletak pada Kecamatan Sematang Borang Palembang.

D. Rumusan Masalah

Didasari dari latar belakang yang telah dijabarkan, perumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh teknologi informasi pada mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Sematang Borang Palembang?
2. Apakah ada pengaruh manajemen berbasis sekolah pada Sekolah Dasar Negeri seluruh Kecamatan Sematang Borang Palembang terhadap mutu pendidikan?
3. Apakah ada pengaruh penerapan teknologi informasi dan manajemen berbasis sekolah dengan bersama-sama di mutu pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Sematang Borang Palembang?

E. Tujuan Penelitian

Didasari dari rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan pada penelitian ini ialah agar mengetahui serta mendeskripsikan:

1. Pengaruh penerapan teknologi informasi pada mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Sematang Borang Palembang.
2. Pengaruh manajemen berbasis sekolah pada mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Sematang Borang Palembang.
3. Pengaruh penerapan teknologi informasi dan manajemen berbasis sekolah dengan bersama-sama pada mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Sematang Borang Palembang.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pihak terkait terutama pihak sekolah dalam pengembangan mutu pendidikan. Secara lebih rinci, manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini ialah antara lain:

1. Manfaat teoritis

Bisa menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil pengamatan langsung serta sebagai informasi untuk pembaca serta pihak yang memiliki kepentingan mengenai pengaruh penerapan teknologi informasi dan manajemen berbasis sekolah pada mutu pendidikan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Kepala Sekolah

Diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah melalui pengelolaan sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik.

b. Bagi Guru

Diharapkan dapat memacu dalam memotivasi diri agar terus belajar dan dapat mengembangkan wawasan terutama dalam bidang teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas guru-guru khususnya di Kecamatan Sematang Borang Palembang, sehingga mutu pendidikan di sekolah bisa dicapai secara lebih baik.

c. Bagi Sekolah

Diharapkan mampu membangun kolektivitas semangat kerja terutama kualitas tenaga pendidik dalam memajukan sekolah serta memberikan dampak yang positif dalam peningkatan mutu sekolah yang nantinya dapat membangun kepercayaan masyarakat.

